

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian mengenai hal-hal yang mendasari penelitian ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kasus kekerasan seksual pada perempuan sudah menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Catatan Tahunan (CATAHU) KOMNAS Perempuan (2020) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia di ranah KDRT/Relasi Personal adalah sama seperti tahun sebelumnya menjadi kasus yang paling banyak, yaitu sebanyak 11.105 kasus atau 75% dari keseluruhan kasus. Di ranah KDRT/Relasi personal, kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah kekerasan fisik yaitu sebanyak 4.783 kasus atau sebanyak 43%, kemudian kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus atau sebanyak 25%, kekerasan psikis sebanyak 2.056 kasus atau sebanyak 19% dan ekonomi sebanyak 1.459 kasus atau sebanyak 13%. Kasus kedua terbanyak yaitu kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas/publik yaitu sebanyak 3.602 kasus atau 24% dari keseluruhan kasus dengan kasus kekerasan seksual sebanyak 58% yaitu pencabulan 531 kasus, perkosaan 715 kasus, pelecehan seksual 502 kasus, dan persetubuhan sebanyak 176 kasus, serta sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Terakhir adalah kekerasan terhadap perempuan di ranah negara, yaitu sebanyak 12 kasus atau 0.1% (KOMNAS PA, 2020).

Sophia Hage, direktur kampanye kelompok penyintas kekerasan seksual Lentera Indonesia yang dilansir dalam BBC Indonesia (2 Mei 2016), menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual di Indonesia seringkali mendapatkan *victim blaming*, atau disalahkan atas apa yang telah terjadi kepadanya. *Victim blaming* atau *blaming the victim* adalah membenaran atas ketidakadilan dengan menimpakan kesalahan pada korban ketidakadilan (Ryan, 1976). Menurut Schoellkopf (2012), *victim blaming* terjadi ketika korban dianggap bertanggung jawab sepenuhnya maupun separuhnya terhadap

peristiwa yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Ullman (1996) di Chicago menunjukkan bahwa 70% responden perempuan pernah mengalami *victim blaming*. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi & Nurwati (2016) menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitiannya melakukan *victim blaming* terhadap korban perkosaan. Rahmandari (2019) juga mengatakan bahwa responden pada penelitiannya sebagian besar melakukan *victim blaming* yang ditunjukkan dengan lebih banyaknya argumen-argumen yang menyalahkan korban (*victim blaming*) dibandingkan dengan argumen-argumen yang mendukung korban.

Mayoritas masyarakat sering kali lebih berfokus pada apa yang dikenakan korban ketika peristiwa terjadi, mengapa korban pulang malam, atau mengapa orang tua korban tidak dapat mendidik anaknya dengan baik dibandingkan dengan tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku (BBC Indonesia, 2 Mei 2016). Bahkan pada Tahun 2011, Gubernur Jakarta pada saat itu, Fauzi Bowo mengatakan bahwa masyarakat Jakarta, khususnya perempuan untuk tidak menggunakan rok mini saat menggunakan angkutan umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Tempo, 18 September 2011). Menurut Neng Dara Affiah, Komisioner Komnas Perempuan, pernyataan Fauzi Bowo tersebut termasuk ke dalam kekerasan verbal terhadap perempuan (Tempo, 18 September 2011). Pernyataan atau anjuran tersebut juga termasuk ke dalam *victim blaming* karena secara tidak langsung mengandung asumsi bahwa kejadian pelecehan seksual yang sebelumnya terjadi disebabkan oleh korban yang menggunakan rok mini.

Tuduhan tersebut tidak beralasan karena mayoritas korban perkosaan tidak menggunakan pakaian yang seksi dan pakaiannya cukup tertutup (Astuti, Pradoto, & Romaria, 2019). Seperti yang dilansir oleh BBC News (10 Januari 2018) di Brussel, Belgia, beberapa baju yang dikenakan oleh korban perkosaan ketika diserang dipamerkan. Mulai dari baju tidur, seragam polisi, celana jeans, sampai baju anak ada di pameran tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri, tepatnya di kota Bandung pernah diadakan pameran pakaian penyintas kekerasan seksual pada tanggal 24 Maret 2019 (VOA Indonesia, 26 Maret 2019). Di pameran tersebut dipamerkan dua belas pasang baju lengkap dari kepala sampai kaki. Ada

kemeja lengan panjang dengan celana jeans panjang dan kerudung hitam, *blouse* longgar dengan celana panjang dan kerudung motif bunga, dan ada juga baju tidur. Baju-baju tersebut tidaklah terbuka atau seksi. Baju-baju tersebut membuktikan bahwa model baju yang dikenakan oleh perempuan bukanlah pemicu perkosaan. Namun tetap saja banyak korban perkosaan yang disalahkan karena baju yang mereka pakai (Astuti, Pradoto, & Romaria, 2019).



Gambar 1. 1 Pakaian penyintas di pameran pakaian penyintas kekerasan seksual

Victim blaming seringkali terjadi karena adanya *rape myth* atau mitos-mitos perkosaan yang tertanam dalam masyarakat patriarkis (Boakye, 2009). Dalam masyarakat patriarki, perempuan dianggap sebagai objek dan norma seksualitas ditentukan dari kacamata laki-laki (Habiba, Ali, & Ashfaq, 2016; Rosida & Lestari, 2017; Hunnicutt, 2009). Pandangan tentang seksualitas yang berpusat pada laki-laki membentuk *rape myths* yang mendorong dan membenarkan perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan, serta merendahkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual (Boakye, 2009). Menurut Burt (1980) *rape myth* adalah prasangka, stereotipe atau keyakinan-keyakinan yang salah tentang perkosaan, korban perkosaan dan pelaku perkosaan. Bentuk *victim blaming* yang muncul dari mitos-mitos perkosaan misalnya ungkapan yang mengatakan bahwa pakaian yang dipakai oleh korban terlalu pendek atau menyalahkan korban karena membiarkan dirinya dalam situasi dan kondisi yang rentan atau dengan membuat alibi atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku sehingga dapat meminimalisir

kesalahan pelaku dan membuat seolah-olah korban tidak mengalaminya (Sprankle, 2017).

Sama seperti di negara lain, di Indonesia, gender menjadi salah satu faktor yang kuat dalam penerimaan mitos perkosaan di masyarakat (Wiyasih, 2015). Penelitian mengenai *victim blaming* dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh Ward, dkk, (1988) menunjukkan bahwa di 13 negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Selandia Baru, Kanada, Hindia Barat, Israel, Turki, India, Hongkong, Malaysia, Zimbabwe, dan Meksiko, laki-laki cenderung menunjukkan sikap negatif terhadap korban perkosaan dibanding dengan perempuan. Maksudnya adalah laki-laki memiliki kecenderungan untuk menyalahkan korban perkosaan dan juga memiliki sikap yang lebih negatif seperti melakukan *victim shaming* terhadap korban. Di Indonesia, Rusyidi & Nurwati (2016) menganalisis hubungan antara sikap terhadap peran gender dengan kecenderungan *victim blaming* pada laki-laki dan perempuan. Penelitiannya menemukan bahwa semakin egaliter sikap terhadap peran gender, baik laki-laki maupun perempuan, maka semakin tinggi penolakan terhadap pernyataan-pernyataan yang menyalahkan atau tidak simpatik terhadap korban serta mendukung pernyataan bahwa pelaku harus bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Dan semakin tradisional sikap terhadap peran gender, maka akan semakin menyalahkan atau memiliki penilaian negatif terhadap korban perkosaan (Rusyidi & Nurwati, 2016).

Dari sisi jenis kelamin, penelitian yang dilakukan oleh Russell & Trigg (2004) di Pennsylvania juga menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan untuk lebih mentoleransi kekerasan seksual dibanding dengan perempuan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kunst, dkk (2018) di Amerika Serikat dan Norwegia juga menunjukkan bahwa sikap laki-laki lebih negatif terhadap gerakan *#metoo*¹, hal ini salah satunya disebabkan oleh diterima atau dipercayanya *rape myth*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lonsway, Cortina, & Magley (2008) di Amerika Serikat yang menunjukkan

¹ Gerakan *#metoo* adalah gerakan perlawanan terhadap kekerasan seksual yang diinisiasi oleh seorang aktivis sosial Amerika Serikat yaitu Tarana Burke pada tahun 2006 (Rakhmadhani, Sushanti, & Surya, 2018)

bahwa laki-laki lebih menyalahkan perempuan dalam kasus kekerasan seksual dibandingkan dengan perempuan. Penelitian lain di Australia juga menunjukkan bahwa laki-laki mendukung pandangan negatif lain tentang korban perempuan (*rape myth*) yang membantu membatasi kesalahan pelaku (Bongiorno, dkk., 2019).

Penelitian di atas meneliti fenomena *victim blaming* pada kelompok masyarakat heteronormatif (Russell & Trigg, 2004; Kunst, dkk, 2018; Lonsway, Cortina, & Magley, 2008; Bongiorno, dkk., 2019). Bagaimana *victim blaming* terjadi di kelompok identitas gender non heteronormatif pernah dilakukan oleh Welch, Hellwege, & Mann (2018). Dalam penelitiannya mengenai *victim empathy*, *victim blaming*, dan identitas gender di Amerika, Welch, Hellwege, & Mann (2018) menunjukkan bahwa transpuan² memiliki empati tertinggi terhadap korban, dan cisgender³ laki-laki cenderung lebih melakukan *victim blaming* dibandingkan dengan cisgender perempuan dan transpria⁴.

Di Indonesia, penelitian *victim blaming* di kelompok transgender pernah dilakukan oleh Yolandasari (2015). Penelitian tersebut menunjukkan ketika kekerasan seksual terjadi pada transgender, *victim blaming* juga kerap terjadi. Bahkan menjadi lebih kompleks karena identitas gender mereka akan dijadikan sebagai alasan tambahan untuk membenarkan tindakan pelaku terhadap mereka (Yolandasari, 2015). Kelompok transgender, terutama transpuan juga sering mendapatkan pelecehan seksual karena identitas mereka dan dianggap sebagai ‘wajah lembut’ (Kompas, 29 Juli 2020). *Victim blaming* tidak selalu terjadi dalam kasus kekerasan seksual, namun juga hal lainnya yang melibatkan korban dan pelaku. Berkaitan dengan LGBT, penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Sinulingga, dkk, (2015) menunjukkan bahwa ketika teman-teman salah satu respondennya mengetahui identitasnya, ia mendapatkan diskriminasi dan

² Transpuan adalah individu yang memiliki jenis kelamin laki-laki ketika lahir namun mengidentifikasi dirinya dan hidup sebagai perempuan (GLAAD, 2014).

³ Cisgender adalah individu dengan gender yang sesuai dengan jenis kelaminnya ketika lahir (GLAAD, 2014).

⁴ Transpria adalah individu yang memiliki jenis kelamin perempuan ketika lahir namun mengidentifikasi dirinya dan hidup sebagai laki-laki (GLAAD, 2014).

kekerasan, yaitu dengan dilempari botol minum, dan yang disalahkan adalah ia karena tidak bisa menyesuaikan dengan norma yang ada di masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang menganut heteronormativitas, sehingga kelompok yang memiliki gender dan orientasi seksual yang berbeda menjadi kelompok marjinal (Niko, 2016) yang sering mendapat diskriminasi dan kekerasan dari kelompok heteronormatif (Widiastuti, Risakotta, & Syamsiyatun, 2016; King, 2016; Saraswati, 2016). Penelitian Yolandasari (2015) meneliti *victim blaming* jika korban kekerasannya adalah kelompok transgender. Sedangkan bagaimana kelompok transgender memandang korban kekerasan seksual, apakah mereka menyalahkan korban atau membela korban, untuk konteks masyarakat Indonesia, masih sulit ditemukan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pandangan kelompok transgender terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebagai kelompok yang termarjinalisasi akibat heteronormativitas (Niko, 2016) dan sering mengalami *victim blaming*, apakah kelompok transgender memiliki empati terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang juga menjadi kelompok yang termarjinalisasi dan dianggap rendah dalam budaya patriarki?

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mengeksplorasi perspektif transgender tentang korban kasus kekerasan seksual dengan judul “Perspektif Transgender tentang Korban Kasus Kekerasan Seksual”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pandangan kelompok transgender tentang perempuan korban kekerasan seksual?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan transgender tentang perempuan korban kekerasan seksual.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat dari segi teori

Menambah ilmu pengetahuan dan konsep pemikiran pada kasus kekerasan seksual dan *victim blaming* terhadap korban kasus kekerasan seksual.

2. Manfaat dari segi kebijakan

Menunjukkan bahwa semakin seriusnya dan semakin bertambahnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, yaitu sebanyak 2.807 kasus pada ranah KDRT/Relasi Personal (KOMNAS Perempuan, 2020) serta sering terjadinya *victim blaming* kepada korban kekerasan seksual. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk membuat kebijakan-kebijakan publik atau untuk penyusunan UU-PKS.

3. Manfaat dari segi praktis

Memberikan pandangan lain kepada masyarakat dari kasus kekerasan seksual yaitu bahwa apapun yang dilakukan dan dipakai oleh perempuan sebagai korban, tidak berarti bahwa korban harus disalahkan dan bertanggung jawab terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada korban. Pandangan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat tidak melakukan *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual.

4. Manfaat dari segi isu serta aksi sosial

Memberi pemahaman bahwa korban kekerasan seharusnya didukung bukan disalahkan, salah satu aksi yang dapat dilakukan adalah Gerakan *#metoo*.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

1.2 Pertanyaan Penelitian

	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Struktur Organisasi Penelitian
BAB II	Tinjauan Pustaka
	2.1 <i>Victim blaming</i>
	2.2 Normalisasi Seksualitas Laki-laki
	2.3 Identitas Gender
	2.4 Prasangka dan Asumsi Sosial
	2.5 Patriarki
BAB III	Metode Penelitian
	3.1 Desain Penelitian
	3.2 Responden dan Tempat Penelitian
	3.3 Pengumpulan Data
	3.4 Analisis Data
	3.5 Uji Keabsahan Data
	3.6 Pelaksanaan Etika Penelitian
	3.7 Prosedur Penelitian
BAB IV	Hasil dan Pembahasan
	4.1 Hasil dan Pembahasan
BAB V	Kesimpulan dan Saran
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran